

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNSI PELAYANAN SKPD

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi syarat utama. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya birokrasi yang efektif dan efisien baik dalam intern organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diperlukan pula aparat yang *Profesional* mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat, dan itu bisa terealisasi bila didukung infrastruktur wilayah yang memadai

Permasalahan pembangunan Industri adalah belum optimalnya Pembinaan terhadap IKM Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan di bidang perindustrian. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah 5 (lima tahun). Berikut ini adalah permasalahan Dinas Perindustrian:

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Permasalahan
 1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja
 2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong
 3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk.
 - b. Solusi
 1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta pembiayaan secara periodic dan berkesinambungan
 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, focus Group Discussion (FGD) penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerjasama dengan perguruan tinggi.
 3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas. Standarisasi produk dan sertifikasi produk
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a. Permasalahan

1. Terbatasnya pengembangan design, penguasaan teknologi dan pemanfaatan green industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong industry kreatif
2. Kurangnya pemahaman manfaat legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk pada industry kreatif
3. Belum terlaksananya penetapan kawasan industri

b. Solusi

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan desain produk, Fokus Group Diskusi (FGD) penguasaan teknologi, dan pemahaman green industry, fasilitasi kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerjasama dengan perguruan tinggi
2. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas. Standarisasi produk dan sertifikasi produk
3. Mendorong percepatan penetapan kawasan industry

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perindustrian serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi untuk melakukan :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan struktur Industri dan daya saing;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian;
4. Pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
6. Perumusan pengembangan iklim usaha, promosi jasa industry dan standarisasi Industri;
7. Penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisa Isu Strategis Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

BIDANG	MASALAH	ISU STRATEGIS
BIDANG INDUSTRI KREATIF, SANDANG DAN KERAJINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Unit Pendampingan Langsung (UPL) dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produk belum optimal; 2. Kurang lengkapnya aspek legalitas usaha dan penjaminan produk seperti sertifikasi P-IRT, Halal, SNI, dll; 3. Kapasitas, Kapabilitas, dan Kualitas IKM belum mengarah pada Industrialisasi 	Industrialisasi dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas serta Kualitas IKM
BIDANG Industri AGRO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk olahan yang terstandarisasi masih relatif sedikit; 2. Jejaring pemasaran (Network Marketing) berbagai produk IKM yang masih terbatas; 3. Belum terarahnya IKM menuju Industrialisasi 	Industrialisasi Agro
BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika masih lemah; 2. Masih belum terpenuhinya ragam/jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat; 3. Jejaring dan akses pemasaran masih terbatas dan sebagian besar untuk pasar lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk 2. Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha; 3. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan
SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan Kualitas SDM aparatur masih kurang; 2. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih kurang. 	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan internal
BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk hasil olahan IKM belum memiliki Nilai Tambah (<i>Added Value</i>); 2. Kemasan dan desain kemasan produk olahan masih sederhana; 3. Jejaring pemasaran produk masih berorientasi pasar lokal. 	Mutu dan Kemasan Produk Olahan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program/ Kegiatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB yaitu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, membuka lapangan kerja baru. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**TELAHAAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DENGAN TUPOKSI DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

VISI DAERAH :		MISI DAERAH :		PROGRAM PRIORITAS DAERAH :			
MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA		MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MEMPERCEPAT PENURUNAN KEMISKINAN, DAN MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN DAERAH		1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
				2 Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial			
				3 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
				4 Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi			
				5 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah			
VISI SKPD :	MISI SKPD :	PROGRAM SKPD :	SASARAN SKPD :				
TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI YANG UNGGUL DAN MANDIRI	1	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI KREATIF, SANDANG DAN KERAJINAN	1	Pelayanan administrasi perkantoran		1	Administrasi perkantoran
	2	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMAJUAN INDUSTRI AGRO	2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2	Sarana dan prasarana aparatur
	3	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	3	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	4	MENINGKATKAN KELANCARAN DAN KETERTIBAN PELAYANAN INTERNAL	4	Peningkatan dan pengembangan ekspor		4	Ekspor yang ditingkatkan dan dikembangkan
	5	MENDORONG KEMAJUAN INDUSTRI OLAHAN DAN KEMASAN	5	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri/lelang		5	Kelancaran perdagangan dalam negeri

	6	Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah	6	Mutu pengolahan komoditi unggulan daerah
	7	Pengelolaan kekayaan budaya (Pendaftaran HaKI - Desain Industri, Merek, Hak Cipta)	7	Pendaftaran HaKI (Desain industri, Merek, Hak Cipta)
	8	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	8	Sentra-sentra Industri Potensial
	9	Pengembangan industri kecil dan menengah	9	Industri Kecil dan Menengah
	10	Peningkatan kemampuan teknologi industri	10	Jenis Kemampuan Teknologi Industri

Berdasarkan tabel diatas, Program Prioritas Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terakomodir melalui Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L

Arah Kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang mengacu pada RPJMN 2005-2025 (undang-undang No. 17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sedangkan kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan RPJMN 2015-2019 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Sasaran – sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan dimana pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 8,6 persen, kontribusi sector industry terhadap PDB mencapai 21,6%, dan penambahan jumlah industry berskala menengah dan besa rselama 5 sebanyak 9.000 unit. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah yaitu sampai dengan tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan Industri.

Memperhatikan kebijakan yang ada serta perubahan lingkungan strategik maka arah kebijakan pembangunan industry adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di Luar Pulau Jawa
 - a. Wilayah pusat pertumbuhan industry terutama yang berada dalam koridor ekonomi
 - b. Kawasan peruntukan industry
 - c. Kawasan Industri
 - d. Sentra IKM.
2. Pertumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9.000 kawasan usaha industry berskala besar dan sedang dimana 50 persen pertumbuhan di luar pulau jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20.000 unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada;
 - a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industry pengolah
 - b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja : Industri mesin-permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika
 - c. Industri penghasil bahan baku dan bahan setengah jadi
 - d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global. Disamping itu Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufaktur,

OEM) di dalam negeri dan menjadi basis pertumbuhan populasi industri besar/sedang.

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah) dengan strategi sebagai berikut:

Strategi Pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri
- b. Membangun paling tidak satu kawasan di luar Pulau Jawa
- c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (Jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistic), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja

A. Karakteristik Industri Nasional:

Pembangunan sector Industri pada masa mendatang memerlukan prasyarat berupa ketersediaan sarana infrastruktur, pembiayaan serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif dan kondusif.

Adapun karakteristik industri nasional sebagai berikut :

1. Industri Manufaktur kelas dunia (World Class Manufacturing) yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi :
 - a. Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur berbasis sumber daya nasional
 - b. Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri
 - c. Terbentuknya daya saing yang kuat dipasar internasional
2. Struktur Industri yang kuat sebagai motor penggerak (prime mover) perekonomian dengan ciri:
 - a. Mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar sub sector industri dan dengan berbagai sector ekonomi lain;
 - b. Memiliki kandungan local yang tinggi
 - c. Menguasai pasar domestik
 - d. Memiliki produk unggulan industri masa depan
 - e. Dapat tumbuh secara berkelanjutan dan

- f. Mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil menengah dan besar yang menjalankan perannya sebagai rantai pasok (supply chain), yang bersifat saling menguntungkan dan membutuhkan skala usaha sektor industri
4. Peran Industri Manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional, sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan devisa

B. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM):

Kebijakan kepada pelaku Industri Kecil Menengah tidak saja kepada Industri Prioritas (Industri Agro, Industri Pangan, Industri Elektronika, Industri Telematika, Industri Tekstil, Alas kaki dan aneka, Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara, Industri Logam Dasar) tetapi ditujukan pada Industri Kerajinan dan Barang Seni, Gerabah/Keramik, batu mulia/perhiasan, tenun tradisional/border, sulam, kerajinan anyaman, dll.

Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain upaya mendorong pertumbuhan sektor Industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan, antara lain meliputi :

1. Dalam rangka penguatan struktur Industri Nasional, peran Industri Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai;
2. Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh WNI demikian juga Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas pengembangan usaha bagi IKM

C. Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah:

Dalam upaya pengembangan Industri Kecil dan Menengah perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan sebagai berikut

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku
Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan skala operasinya. IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dalam

melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

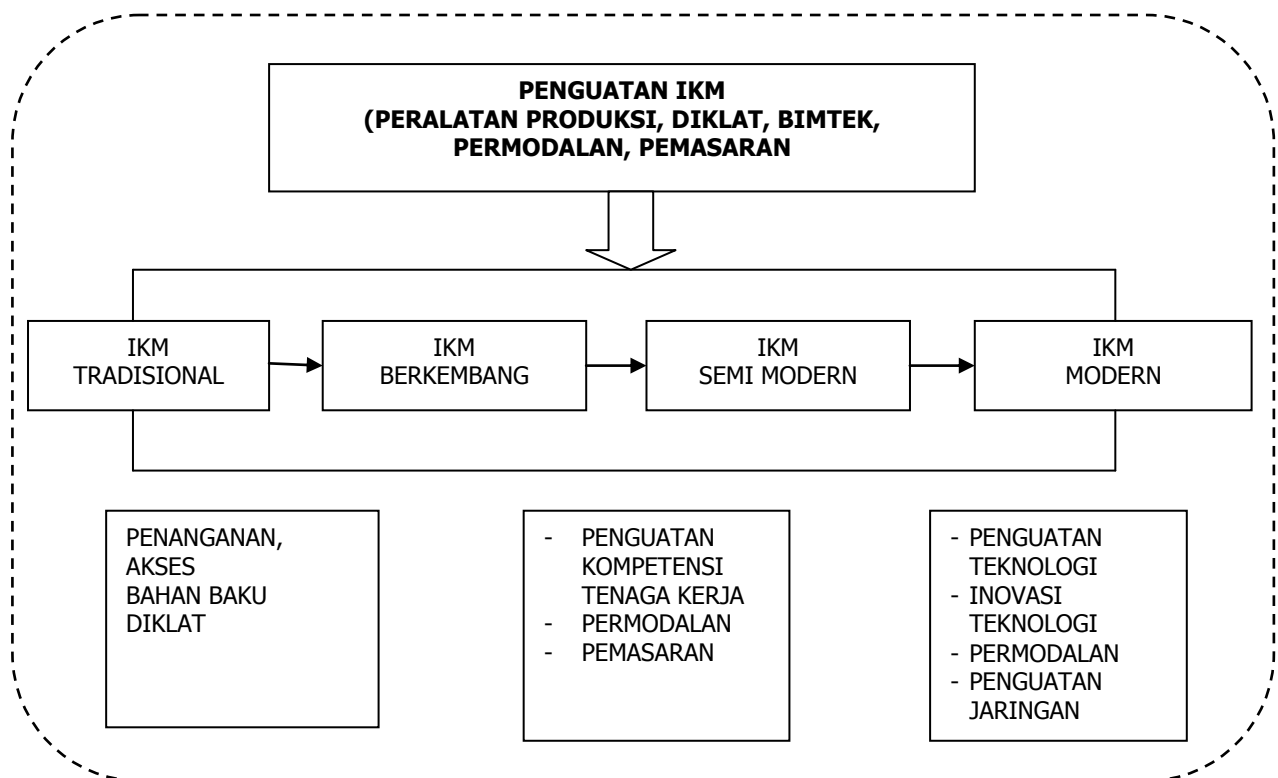
Dibalik keterbatasan dalam permodalan IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada Industri Padat Karya. Melalui dukungan pada sentra-sentra IKM dan penguatan kelembagaan, maka pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relative lebih mudah dibanding Industri besar, sehingga berpotensi membuka lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Namun upaya ini perlu diikuti dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja IKM.

3. Pemanfaatan Tehnologi, Inovasi dan Kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Berbagai teknologi sederhana mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di Industri. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas disesuaikan dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi

Gambaran mengenai Strategi Pengembangan IKM dilaksanakan melalui Skhema pengembangan pada gambar dibawah ini

GAMBAR : TAHAPAN PENGEMBANGAN IKM



Sejalan dengan IAFTA dan AANZFTA, masuknya produk-produk impor pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri. Dibutuhkan kebijakan yang sistemik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk komoditi lokal baik pada sisi produksi, pengolahan sampai dengan distribusi yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain:

- a) Pengembangan Industri Kecil menengah yang kuat sehingga berperan dalam pembentukan PDB
- b) Meningkatkan Investasi di industry-industri yang padat karya dan menata struktur teknologi industry;
- c) Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses pengolahan bahan baku local di daerah sehingga produk bahan baku local tidak dijual dalam kondisi mentah; z
- d) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;
- e) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk impor dan barang berbahaya;
- f) Menggalakkan gerakan "Cinta Produk Dalam Negeri.

Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industry agar daya saing inndustri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada sector hulu maupun hilir.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industry harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan Pupuk, Insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain; (2) Peningkatan produk olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah-buahan; dan (3) Revitalisasi industry gula dalam rangka swasembada gula dalam negeri. Agar dukungan sector industry optimal, maka industry pupuk akan direvitalisasi dan industry alat pertanian dikembangkan diseluruh daerah, khususnya di sentra-sentra produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahan pangan antara lain:

- a) Pengembangan industry pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam local;
- b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c) Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam local berdasarkan pengaturan iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;
- d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan

Keberhasilan sektor industri sangat tergantung dari dukungan sector ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energy, listrik, jalan, dan transportasi, tenaga kerja serta insentif dibidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan-dukungan tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan kompetensi inti daerah.

Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternative pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industry kecil dan menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya sektor industry kreatif berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan Klaster-Klaster Industri Prioritas Nasional; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam kedua aspek ini sudah termasuk **menumbuh kembang industri kecil dan menengah, mendorong tumbuhnya industry baru yang memperkuat struktur, dan menambah kapasitas terpasang nasional**. Selanjutnya Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kluster Industri Prioritas, dan 18 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.

Dalam mendorong peningkatan daya saing industry nasional, pemerintah akan menggunakan empat instrument pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan infrastruktur kawasan industry; d) Dukungan administrasi termasuk mengundang peran swasta dengan skema Publik Private Patnership.

Mengenai Bangunan Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industry manufaktur dan industry andalan masa depan. Basis industry manufaktur yaitu spectrum industry yang telah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sector industry. Kelompok industri ini keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang perlu direkruturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas dunia. Industri-industri andalan masa depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut; c) Industri Telematika.

3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NTB DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI

RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 bahwa kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan berdasarkan asas: a. Keterpaduan; b. Keserasian, keselarasan dan kesinambungan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. Keterbukaan; f. Kebersamaan dan kemitraan; g. Perlindungan kepentingan umum; h. Kepastian hukum dan keadilan; dan i. Akuntabilitas. Adapun tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agribisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

Berdasarkan struktur ruang wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sedangkan PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, PotoTano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

Konektifitas antar wilayah dan tata ruang yang ke-2 adalah Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) belum memadai

Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) di provinsi NTB masih perlu ditingkatkan. Sarana prasarana pendidikan (sekolah beserta kelengkapannya seperti buku, alat peraga), sarana prasarana kesehatan (Poskesdes, Puskesmas), pelayanan sosial (panti sosial), utamanya di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, pegunungan masih terbatas. Disparitas antara kota dan perdesaan masih terlihat.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengemdalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan

Tabel 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN OPD	CATATAN PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tamoung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. Alih fungsi lahan (Kawasan lindung, suaka alam, persawahan) mejadi peruntukan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya b. Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan	Memasukkkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
2.	Perkiraan mengenai dampak risiko lingkungan hidup	Terjadi penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah industry	Mendurong pelaksanaan green industri	
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh		

3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara barat, dan kekuatan tersebut diantaranya adalah:

1. Tersedianya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (dana dan fasilitas kerja) yang memadai dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan;
2. Hilirisasi dan Industrialisasi yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Kerjasama pengembangan dan pemasaran produk regional, nasional, bilateral, maupun multilateral.

4. Telah ditetapkannya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sehingga dapat mempercepat hilirisasi Industri

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kelemahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sarana-prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam pelayanan maupun pembinaan di bidang teknis, manajemen dan kewirausahaan masih terbatas;
2. Kualitas, Kapasitas, kapabilitas dan atribut IKM yang masih lemah dan terbatas;
3. Mutu dan kualitas kemasan produk olahan IKM masih sederhana dan belum mampu memenuhi tuntutan pasar.
4. Kesenambungan ketersediaan pasokan bahan baku sering sulit diperoleh

C. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan kondisi yang mendukung dan dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan peluang tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), AFTA, WTO, membuka akses pasar bagi IKM dalam memasarkan hasil produknya dan menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha lainnya secara regional, nasional, bilateral maupun multilateral;
2. Kemajuan Teknologi dan Informasi mendorong IKM untuk meningkatkan Kompetensi yang komparatif dan kompetitif dalam industrialisasi IKM;
3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung Industrialisasi IKM dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
4. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia.

D. Ancaman (*Treath*) DINAS

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dan ancaman tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Era globalisasi (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA, AFTA, WTO, dll) membuka pasar dalam negeri terhadap tingkat persaingan yang semakin kompetitif dengan produk sejenis;
2. Regulasi maupun kondisi-kondisi di luar sektor industri dan perdagangan yang dapat mempengaruhi pasar dalam negeri seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan upah buruh (UMP), mekanisme perizinan yang rumit,dll;
3. Kestinambungan ketersediaan Sumber Daya Alam dalam mendukung kelancaran proses produksi.
4. Instabilitas keamanan di daerah, sehingga dapat mempengaruhi investasi sektor Industri yang bersifat jangka panjang

TABEL MATRIK SWOT PENENTUAN STRATEGI KOMITMEN PEMERINTAH

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>PELUANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), AFTA, WTO, membuka akses pasar bagi IKM dalam memasarkan hasil produknya dan menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha lainnya secara regional, nasional, bilateral maupun multilateral; 2. Kemajuan Teknologi dan Informasi mendorong IKM untuk meningkatkan Kompetensi yang komparatif dan kompetitif dalam industrialisasi IKM; 3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung Industrialisasi IKM dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN. 	<p style="text-align: center;"><u>ANCAMAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Era globalisasi (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA , AFTA, WTO, dll) membuka pasar dalam negeri terhadap tingkat persaingan yang semakin kompetitif dengan produk sejenis; 2. Regulasi maupun kondisi-kondisi di luar sektor industri yang dapat mempengaruhi pasar dalam negeri seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan upah buruh (UMP), mekanisme perizinan yang rumit, dll; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam menjamin kesinambungan ketersediaan bahan baku dalam mendukung kelancaran proses produksi.
	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi SDA dan SDM yang memadai dan belum dimanfaatkan secara optimal; 2. Dukungan sentra-sentra indag dan Hilirisasi Industri (sistem kluster) yang didukung pemerintah; 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Kab./ Kota se-NTB dalam penggalian potensi-potensi komoditi INDUSTRI untuk dipromosikan menjadi produk unggulan daerah; 2. Konsultasi dengan Kementerian Perindustrian RI; 3. Inventarisasi IKM menuju Hilirisasi industri, modernisasi dan Industrialisasi; 4. Edukasi IKM tentang prosedur ekspor-impor; 5. Fasilitasi IKM dalam aksesibilitas promosi dan pemasaran produk IKM; 6. Negosiasi kerjasama regional, bilateral, multilateral dalam pengembangan sektor industri.
<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM, lemahnya kapasitas, kualitas, dan kapabilitas IKM dalam industrialisasi proses produksi dan pemasaran hasil produknya; 2. Keterbatasan kapitalisasi/akses permodalan IKM dalam mengembangkan Usahanya; 3. Kualitas dan atribut IKM yang lemah, legalitas usaha, dan manajemen sederhana akibat belum diterapkannya standarisasi minimum dalam perusahaan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubasi IKM dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas menuju industrialisasi sistem produksi dan modernisasi pemasaran Produk IKM; 2. Konsultasi dengan Kementerian Perindustrian RI; 3. Edukasi IKM tentang prosedur ekspor-impor dan standar internasional (SNI, ISO); 4. Fasilitasi aksesibilitas permodalan, legalitas usaha, sistem manajemen dan pemasaran; 5. Negosiasi alih teknologi IKM dalam mendukung industrialisasi IKM. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar pemerintah daerah, pusat maupun institusi terkait; 2. Konsultasi kebijakan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; 3. Investigasi dan pengawasan produk-produk tak sesuai standar Nasional; 4. Edukasi prosedur ekspor-impor, modernisasi manajemen proses produksi dan pemasaran produk IKM; 5. Fasilitasi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dan aksesibilitas pasar produk IKM; 6. Negosiasi kerjasama regional, bilateral, multilateral dalam pengembangan sektor industri .